



ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN, SUKU BUNGA, PENETRASI DEMOGRAFIS DAN GEOGRAFIS PERBANKAN TERHADAP TOTAL KREDIT UMKM (Studi kasus Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2015)

Mizan Ikhlasul Rahman, Endang Tri Widyarti¹
mizanikh@gmail.com

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50275, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Financial inclusion becomes international interest and national priority. The more inclusive financial access, the more opportunity people have to improve their economy. Financial inclusion has become an alternative way to grow economy of society. Credit is one of financial services which can improve people's economy, specifically for SME in capital credit. This research examines effects from factors such as people income, education level, interest rate, demographic and geographic penetration of banking to SME credit. Samples selected in this research by total sampling method. Samples used are 35 cities and regencies at Central Java in 2011-2015. Data analysis using data panel regression analysis with Fixed Effect Model and Generalized Least Square. This research shows that people income has insignificant positive effect to SME credit, education level has significant negative effect, interest rate has insignificant negative effect, demographic penetration of banking has insignificant positive effect and geographic penetration of banking has significant positive effect.

Keywords: Financial Inclusion, SME Credit, Income, Education, Interest Rate, Demographic Penetration, Geographic Penetration.

PENDAHULUAN

Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016, institusi perbankan melalui fungsi intermediasinya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan tersebut. Intermediasi tersebut diwujudkan dalam bentuk jasa perbankan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Inklusi keuangan muncul sebagai salah satu solusi agar masyarakat luas dapat mengakses segala jasa perbankan dengan meniadakan hambatan, baik bersifat harga maupun non-harga. Saat ini inklusi keuangan telah menjadi prioritas nasional (Martowardojo, 2014). Meskipun menurut kajian Bank Dunia pada 2014, akun perbankan hanya dimiliki 36 persen penduduk Indonesia.

Pada tahun 2013, Bank Indonesia memaparkan evolusi kerangka kebijakan keuangan inklusif (*Financial Inclusion*) di Indonesia. Dalam paparannya, disebutkan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang berada dalam kategori *underbanked*. Salah satu penyebabnya adalah jumlah penyebaran kantor bank di Indonesia yang tidak merata. Wilayah Kalimantan Timur, daerah-daerah di Pulau Jawa, Bali serta Jakarta tercatat memiliki jumlah kantor bank yang berlebihan dibandingkan dengan jumlah penduduknya, sedangkan wilayah-wilayah lainnya mengalami keadaan sebaliknya. Padahal seperti yang diketahui, bank merupakan salah satu penyedia jasa perbankan bagi masyarakat, yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut World Bank (2010), ada empat jasa perbankan yang harus dapat diakses seluruh masyarakat yaitu layanan sistem pembayaran, layanan asuransi dan pensiun, layanan penyimpanan dana serta layanan kredit. Layanan-layanan tersebut didukung oleh enam pilar keuangan inklusif yang telah disiapkan seperti edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi perbankan, kebijakan dan peraturan pendukung, fasilitas dan intermediasi pendukung, serta perlindungan konsumen. Terkait dengan keuangan inklusif, maka pemberdayaan UMKM di Indonesia perlu ditingkatkan. Namun pemberdayaan UMKM menghadapi berbagai masalah seperti kurangnya pengetahuan sumber daya manusia yang

¹ Corresponding author

menghambat perkembangan UMKM, hingga terbatasnya modal kerja yang dapat mendukung keberlangsungan UMKM (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Maka dari itu adanya strategi keuangan inklusif melalui fasilitas keuangan publik diharapkan dapat memudahkan akses pendanaan dan pendampingan UMKM serta membentuk sinergi antar lembaga-lembaga penyalur kredit, bank maupun non-bank.

Pemberian kredit merupakan salah satu solusi yang hadir di tengah masyarakat dan UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM itu sendiri. Dengan adanya kredit, diharapkan pengembangan sektor riil mengalami percepatan. Kredit sebagai jalan untuk meningkatkan pertumbuhan negara dan sarana membuka lapangan kerja baru. Untuk itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam pemberian kredit, selain itu sistem yang baik serta kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlangsungannya.

Menurut Kasmir (2012), berdasarkan penggunaannya kredit dibagi menjadi kredit konsumtif dan produktif. Kredit konsumtif seperti kredit perumahan atau kendaraan yang memberikan kepuasan langsung terhadap penggunaannya masih menjadi andalan karena pertumbuhannya yang pesat. Namun pertumbuhan ekonomi tidak bisa selamanya digantungkan pada sektor konsumsi, karena itu kredit produktif perlu menjadi perhatian. Kredit produktif pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, kredit investasi dan kredit modal kerja. Sektor UMKM menjadi salah satu tujuan yang tepat untuk menyalurkan kredit produktif tersebut, yaitu kredit modal kerja. Dengan itu UMKM menjadi lebih siap dalam menghadapi persaingan pasar yang saat ini lebih bebas dari sebelumnya.

Tolak ukur perkembangan inklusi keuangan adalah terbukanya secara luas akses jasa perbankan bagi masyarakat, salah satunya adalah layanan kredit. Kredit UMKM ataupun kredit usaha rakyat (KUR) memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan sektor UMKM. Sabirin (2011) dalam Sudaryanto, dkk (2014) menjelaskan bahwa tersedianya sumber pembiayaan merupakan salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil. Telah diatur dalam UU. No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Kredit UMKM dibagi menjadi tiga jenis, 1) kredit mikro, yaitu kredit dengan pemberian maksimal Rp 50 juta, 2) kredit kecil, yaitu kredit dengan pemberian antara Rp 50 hingga Rp 500 juta, 3) kredit menengah, yaitu kredit dengan pemberian antara Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Dari sisi perbankan, dilihat dari Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah (2016) bahwa pertumbuhan kredit di Jawa Tengah pernah berada di atas pertumbuhan kredit nasional sebesar 8,78 persen (yoy). Adapun berdasarkan penggunaannya, sebesar 58,48 persen masih didominasi oleh kredit modal kerja dan sisanya berupa kredit investasi dan konsumsi. Meskipun demikian, kualitas kredit perbankan mengalami penurunan terlihat dari meningkatnya NPL menjadi sebesar 4,09 persen pada triwulan II. Selain itu menurut Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Tengah, walaupun UMKM di Jawa Tengah jumlahnya lebih dari 3 juta akan tetapi permodalan dan akses perbankan masih menjadi masalah kendala perkembangan UMKM.

Maka diperlukan sinergi yang lebih kuat oleh berbagai pihak dari pelaku usaha dengan pemerintah, Kadin Jateng, perbankan serta lembaga keuangan lainnya untuk mendukung pemerataan dan penyaluran kredit usaha. Saat ini kota-kota di Jawa Tengah masih menjadi pusat akses keuangan masyarakat Jawa Tengah, seperti halnya kota Semarang di mana pangsa pasar jaringan kantor perbankan mencapai 28 persen dari total jaringan kantor perbankan di Jawa Tengah (Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah, 2016).

Adapun tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah masih lebih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan nasional. Tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah sebesar 66,23 persen yang mana lebih rendah dari tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 67,82 persen (Survei Nasional Inklusi Keuangan, 2016). Hal itu menunjukkan bahwa akses keuangan di Jawa Tengah belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Jawa Tengah, sejalan dengan itu maka permodalan usaha tentu belum dapat disalurkan secara merata. Untuk itu tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat suku bunga, dan jumlah kantor perbankan dapat mendukung perkembangan dan penyaluran kredit UMKM.

Keberlangsungan kredit tak lepas dari berbagai faktor. Menurut Danisty (2009), penawaran dan permintaan kredit UMKM dipengaruhi oleh kondisi internal perbankan dan faktor makroekonomi

seperti *gross domestic product* (PDB), nilai tukar, maupun inflasi. Selain itu tingkat suku bunga juga memiliki pengaruh terhadap tingkat jumlah kredit UMKM yang disalurkan. Sementara itu beberapa penelitian lain meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit UMKM, seperti Nikaido, Pais, Sarma (2015) yang meneliti bahwa ukuran sebuah usaha dan tingkat pendidikan pemiliknya memiliki asosiasi yang positif terhadap kredit. Sejalan dengan itu, Fungacova dan Weill (2015) menjelaskan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin besar kemungkinan mereka mengakses jasa perbankan seperti memiliki akun di perbankan maupun mengambil kredit. Meski begitu masih banyak masyarakat yang enggan mengakses pinjaman berupa kredit dari lembaga penyalur kredit atau perbankan, dan lebih memilih untuk mendapatkan pinjaman dari keluarga atau teman. Menurut Chen dan Chivakuli (2008), tingginya tingkat pendapatan akan mengurangi hambatan seseorang dalam mengambil kredit.

Dari sisi eksternal, persebaran kantor perbankan dan penyalur kredit mempengaruhi akses masyarakat terhadap kredit. Jika persebaran lembaga-lembaga tersebut merata maka kesenjangan antara masyarakat yang dapat dan tidak dapat mengakses jasa perbankan akan semakin rendah. Dijelaskan dalam penelitian Chakravarty dan Pal (2013) bahwa penetrasi perbankan dan ketersediaan kredit dapat membantu perkembangan inklusi keuangan, yang berarti semakin banyak masyarakat yang dapat mengambil kredit. Semakin dekat masyarakat dengan perbankan maka inklusi keuangan semakin besar lingkungannya (Allen, *et al.* 2015). Dalam hal ini penetrasi perbankan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan inklusi keuangan (Sharma, 2015).

Mengacu pada jumlah akun masyarakat Indonesia di perbankan sebesar 36 persen, maka dapat dikatakan posisi Indonesia masih tertinggal dalam hal inklusi keuangan. *Financial exclusion* di Indonesia cukup tinggi, menurut survey LD-FEUI, hanya 35 persen responden yang mempunyai akun di bank. Meskipun demikian, di awal bulan September tahun 2016 ini, Jokowi bertemu bertemu Ratu Maxima selaku utusan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk inklusi keuangan. Ratu Maxima mengapresiasi perkembangan inklusi keuangan di Indonesia dan diharapkan Indonesia dapat mendapat bantuan teknis dari PBB terkait hal tersebut (Antara News, 2016).

Selain itu jumlah UMKM yang begitu banyak di Indonesia menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyaluran kredit sebagai modal kerja harus lebih diperhatikan untuk mendorong perkembangan UMKM. Pertumbuhan kredit UMKM tercatat di triwulan II tahun 2016 ini memang meningkat dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 8,3 persen, yang mana di triwulan sebelumnya hanya meningkat 6,2 persen. Meski demikian pertumbuhan itu mengalami perlambatan karena berada di bawah pertumbuhan kredit secara nasional sebesar 8,9 persen. Sedangkan pangsa kredit UMKM meningkat 0,2 persen di triwulan II sebesar 19,7 persen. Adapun dari sisi perbankan, bank sentral telah menetapkan bahwa minimal 10 persen dari total kredit telah disalurkan ke UMKM pada akhir 2016. Bank Indonesia memang mewajibkan perbankan mengucurkan kreditnya kepada industri kecil menengah secara bertahap seperti yang dijelaskan dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 17 tahun 2012. Di samping itu, hingga saat ini akses modal ke perbankan didapatkan setidaknya 22 persen UMKM, dari total 57,8 juta unit usaha yang ada di Indonesia.

Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kredit UMKM di Jawa Tengah, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan yang diukur dari pendekatan produk domestik regional bruto, tingkat pendidikan dalam tahun, suku bunga, penetrasi demografis serta penetrasi geografis perbankan akan diteliti pengaruhnya terhadap kemampuan dan akses masyarakat dalam mendapatkan kredit UMKM di Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kredit UMKM

Tingkat pendapatan menjadi salah satu hal yang sangat dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan seseorang untuk bisa mengambil kredit. Tingkat kredit yang didapatkan seseorang searah dengan tingkat pendapatannya, selain itu tingkat pendapatan dapat menjadi indikator kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman. Tingkat inklusi keuangan di suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakatnya, semakin baik tingkat pendapatan masyarakat maka semakin besar kemungkinan masyarakat mengakses layanan keuangan (Fungacova dan Weill, 2015). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Gine dan Yang (2009) memiliki hasil penelitian yang sama dan

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat pendapatan dan pinjaman atau kredit yang digunakan oleh masyarakat.

H1: Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kredit UMKM.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kredit UMKM

Tingkat pendidikan menjadi penting karena masyarakat yang teredukasi dengan baik dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan di suatu daerah, hal itu juga tercermin dari strategi nasional keuangan inklusif Indonesia yang menjadikan edukasi salah satu pilar dalam strateginya. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar peluang masyarakat dalam memahami berbagai informasi, selain itu tinggi tingkat pendidikan juga mencerminkan kedudukan masyarakat yang lebih tinggi serta dipandang lebih baik. Diniz, Birochi dan Pozzebon (2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa akses terhadap layanan keuangan hanya akan menjadi efektif jika diiringi dengan edukasi finansial yang baik. Sejalan dengan itu Gine dan Yang (2009) menunjukkan ada korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dan akses masyarakat terhadap kredit yang diambil olehnya.

H2: Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kredit UMKM.

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kredit UMKM

Situmorang dan Situmorang (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa suku bunga selama ini menjadi penghambat pembiayaan UMKM. Selama ini Indonesia belum berani menurunkan suku bunga kredit mikro, dikarenakan biaya operasional perbankan yang begitu tinggi dalam menyalurkan jasa kredit mikro. Dijelaskan bahwa semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah investasi. Begitupun Danisty (2009) menyebutkan bahwa permintaan kredit UMKM dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh suku bunga kredit.

H3 : Suku bunga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kredit UMKM.

Pengaruh Penetrasi Demografis Perbankan Terhadap Kredit UMKM

Dalam meningkatkan penggunaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang juga meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, penetrasi demografis perbankan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan. Semakin banyak kantor jaringan perbankan, maka akan semakin mudah pihak perbankan bertemu dengan calon-calon nasabah serta akan lebih mudah mengeluarkan maupun menerima jasa perbankan. Chakravarty dan Pal (2013) menyebutkan penetrasi demografis yang diukur dari jumlah kantor atau cabang perbankan per jumlah penduduk dewasa merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat inklusi keuangan. Sejalan dengan itu Sharma (2015) melalui hasil penelitiannya menemukan hubungan yang kuat antara penetrasi perbankan dengan pertumbuhan.

H4: Penetrasi demografis perbankan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kredit UMKM.

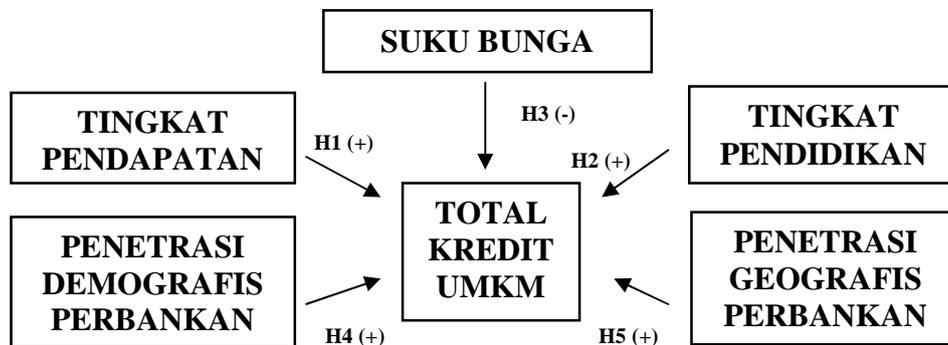
Pengaruh Penetrasi Geografis Perbankan Terhadap Kredit UMKM

Dalam meningkatkan penggunaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang juga meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, penetrasi geografis perbankan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan. Semakin banyak kantor jaringan perbankan, maka akan semakin mudah pihak perbankan bertemu dengan calon-calon nasabah serta akan lebih mudah mengeluarkan maupun menerima jasa perbankan. Chakravarty dan Pal (2013) menyebutkan penetrasi geografis yang diukur dari jumlah kantor atau cabang perbankan per luas suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat inklusi keuangan. Sejalan dengan itu Sharma (2015) melalui hasil penelitiannya menemukan hubungan yang kuat antara penetrasi perbankan dengan pertumbuhan.

H5: Penetrasi geografis perbankan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kredit UMKM

Berdasarkan tinjauan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Fungacova dan Weill, Gine dan Yang, Diniz, Birochi dan Pozzebon, Situmorangan dan Situmorang, Chakravarty dan Pal, Sharma, Abdul-Jalil

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat. Variabel terikat yaitu kredit UMKM, sedangkan variabel bebas terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, suku bunga, penetrasi demografis dan geografis perbankan.

Salah satu dimensi dalam mengukur tingkat inklusi keuangan yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah dimensi penggunaan. Semakin besar penggunaan jasa keuangan oleh masyarakat maka semakin tinggi inklusi keuangan di Indonesia. Besarnya penggunaan salah satunya diukur dari jumlah akun kredit yang dimiliki masyarakat. Dalam penelitian ini tingkat inklusi keuangan diwakili oleh tingkat penggunaan masyarakat terhadap kredit UMKM. Mengacu dari indikator penggunaan inklusi keuangan Bank Indonesia maka penggunaan kredit UMKM adalah total kredit UMKM yang disalurkan per total kredit yang telah diterima UMKM dalam kabupaten dan kota dalam periode tertentu.

Tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan pinjaman atau kredit. Tingkat pendapatan adalah jumlah pengeluaran yang dikeluarkan masyarakat dalam periode tertentu. Penelitian Fungacova dan Weill (2015) menggunakan tingkat produk domestik bruto suatu negara dalam mengukur tingkat pendapatan. Begitupun Chakravarty dan Pal (2013) dalam penelitiannya yang menggunakan data tingkat pendapatan per kapita negara dalam mengukur tingkat pendapatan, yang mana tingkat pendapatan per kapita merefleksikan PDB per kapita suatu negara. Maka setelah disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dalam penelitian ini tingkat pendapatan diukur dari PDRB kota dan kabupaten di Jawa Tengah.

Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir. Penelitian Fungacova dan Weill (2015) menggunakan tingkat tahun pendidikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu negara. Tingkat pendidikan tersebut menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan masyarakat dalam mengenyam tingkat pendidikan. Maka dalam penelitian ini tingkat pendidikan diukur dari angka partisipasi tingkat pendidikan dikali tahun yang dihabiskan masyarakat dalam menempuh tingkat pendidikan.

Suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam berdasarkan persentase penggunaan jumlah uang melalui kesepakatan kedua belah pihak selama periode waktu tertentu. Suku bunga kredit perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga pinjaman kota dan kabupaten di Jawa Tengah.

Penetrasi demografis perbankan diartikan sebagai jumlah kantor atau cabang perbankan di suatu daerah per jumlah penduduk dewasa (Chakravarty dan Pal, 2013). Dalam penelitian ini jumlah kantor atau cabang perbankan tersebut diukur jumlahnya per jumlah penduduk dewasa.

Penetrasi geografis perbankan diartikan sebagai jumlah kantor atau cabang perbankan di suatu daerah per luas daerah tersebut (Charavarty dan Pal, 2013). Dalam penelitian ini jumlah kantor atau cabang perbankan tersebut diukur jumlahnya per luas suatu daerah.

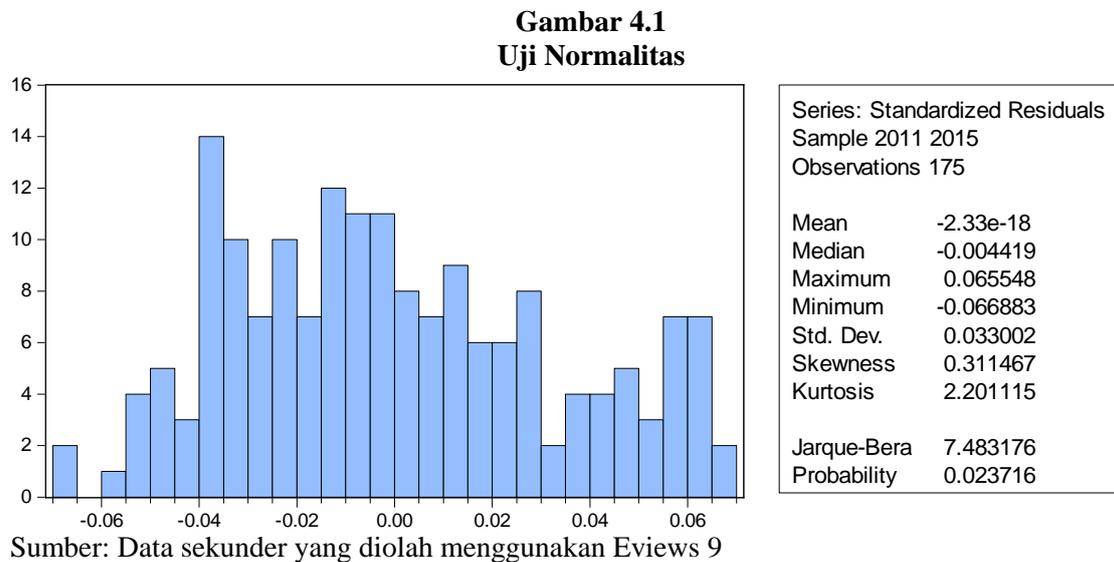
SAMPEL DAN METODE ANALISIS

Populasi penelitian ini adalah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah. Adapun sampel penelitian ini adalah provinsi Jawa Tengah dalam lingkup 35 kota dan kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dan *Generalized Least Square*. Persamaan regresi dalam penelitian telah diuji dengan uji asumsi klasik, sementara itu model analisis regresi dipilih berdasarkan hasil *chow test* dan *hausman test*.

HASIL ANALISIS

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data yang dilakukan pada model penelitian ini ada di gambar 4.1.



Gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.023716 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0.05 sehingga H_0 ditolak. Hasil uji normalitas ini hanya memberi gambaran kasar sehingga tidak masalah jika tidak diperhatikan (Widhiarso, 2012). Selain itu untuk observasi atau set data yang cukup besar maka hasil uji normalitas dapat diabaikan dan tidak penting (Gujarati, 2013).

Uji Multikolinearitas

Berikut tabel 4.2 yang menunjukkan nilai korelasi antar variabel bebas.

Tabel 4.1
Partial Correlation Coefficient

	PDRB	PEND	SB	PENDEM	PENGEO
PDRB	1.000000	0.226122	-0.126886	-0.100549	-0.146651
PEND	0.226122	1.000000	-0.432794	0.513304	0.346646
SB	-0.126886	-0.432794	1.000000	-0.293401	-0.150346
PENDEM	-0.100549	0.513304	-0.293401	1.000000	0.777103
PENGEO	-0.146651	0.346646	-0.150346	0.777103	1.000000

Sumber: Data sekunder yang diolah dalam Eviews 9

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai korelasi tertinggi adalah 0.777103 yaitu antara variabel Pendem dan Pengeo, sedangkan nilai korelasi terendah adalah -0.432794 yaitu antara variabel Pend

dan SB. Dengan adanya hasil tersebut, maka tidak ada nilai korelasi yang melebihi 0.8 yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji Autokorelasi

Di bawah ini tabel hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.2
Hasil Uji Autokorelasi

Model Penelitian	D	1.80673
	D _u	1.79961
	4-d _u	2.20039
n = 175	d _i	1.70620
k = 5	4-d _i	2.29380
$d_u < d < 4-d_u$	tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	

Sumber: Data sekunder yang diolah dalam Eviews 9

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil uji Durbin-Watson pada model penelitian ini yaitu ditemukan tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Dalam model penelitian ini nilai d_u sebesar 1.79961 lebih kecil dari nilai d sebesar 1.80673 dan nilai $4-d_u$ lebih besar dari nilai d . Dengan hasil tersebut maka disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif dalam model penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hipotesis yang diuji adalah:

$$H_0 : \text{Homoskedastisitas}$$
$$H_1 : \text{Heteroskedastisitas}$$

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas-White Test

Obs*R ²	13.88826
P Obs*R ²	0.0163
	0.05
H ₀ ditolak	

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan Eviews 9

White Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada model penelitian ini dihasilkan bahwa P-Value lebih kecil dari sebesar 0.05. Maka disimpulkan terdapat heteroskedastisitas dalam model ini.

Pada akhirnya untuk mengatasi heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi diperlukan perlakuan *Generalized Least Square* (GLS). Gujarati dalam Putri (2009) menjelaskan bahwa estimator yang dihasilkan dengan metode GLS sudah bersifat BLUE.

Uji Chow

Untuk memilih model terbaik yang akan digunakan antara Common Effect Model atau Fix Effect Model, maka diperlukan Chow Test. H_0 menyatakan bahwa model terbaik yang digunakan adalah Common Effect Model, sedangkan alternatifnya (H_1) menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

Tabel 4.4
Chow Test of Redundant Fixed Effect

	F	72.1878
Model	d.f	(34,135)
Penelitian	P-Value	0.0000
		0.05
	H ₀ ditolak	

Sumber: Eviews 9 Chow Test Output (diolah)

Chow Test diperlukan untuk mengukur apakah diperlukan analisis panel data yang lain atau hanya cukup menggunakan regresi biasa, maka dilakukanlah uji ini (Widarjono, 2013). Pada model 1, dihasilkan P-Value sebesar 0.0000 yang mana hal itu lebih kecil dari nilai α . Dengan hasil tersebut maka model terbaik yang akan digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Hausman Test dilakukan untuk memilih model terbaik yang akan digunakan antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* (Widarjono, 2013). *Hausman Test* menggunakan distribusi Chi-square untuk mengambil keputusan. Penolakan H₀ terjadi jika P-Value lebih kecil dari level signifikansi α . Maka dari itu *Fixed Effect Model* yang akan digunakan. Sebaliknya jika P-Value lebih besar dari α maka *Random Effect Model* yang akan digunakan.

Tabel 4.5
Hausman Test of Correlated Random Effect

	Chi-sq.	17.1165
Model	d.f	5
Penelitian	P-Value	0.0043
	Tab ²	11.070
		0.05
	H ₀ ditolak	

Sumber: Eviews 9 Hausman Test output (diolah)

Hausman Test dilakukan untuk mengukur konsistensi *Random Effect Model*, dimana *Fixed Effect Model* diketahui konsisten. Dihilangkan P-Value sebesar 0.0043 yang berarti penolakan terhadap H₀ karena lebih kecil dari α . Dengan hasil tersebut maka model terbaik yang dipakai adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Statistik F

Uji F-statistic adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F-statistic ini didasarkan pada perbandingan antara nilai F-hitung dengan F-tabel (Widarjono, 2013). Jika F hitung < F tabel, maka H₀ diterima yaitu variabel-variabel independent secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependent. Jika F hitung > F tabel, maka H₀ ditolak yaitu variabel-variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent.

Berikut tabel hasil uji statistik F dalam penelitian ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji F

Variabel Independent	Variabel Dependent	F _{calc}	F _{crit}
Tingkat Pendapatan			
Tingkat Pendidikan			
Suku Bunga	Kredit		
Penetrasi Demografis	UMKM ($\alpha = 0.05$)	83.7816	2.27
Penetrasi Geografis			

Sumber: Data sekunder diolah dalam Eviews 9

Berdasarkan hasil output Eviews 9 pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai statistik F hitung dari model penelitian lebih besar dari nilai F tabel, sehingga H_0 ditolak, yang berarti variabel PDRB atau tingkat pendapatan, indeks tingkat pendidikan, suku bunga, penetrasi demografis dan penetrasi geografis perbankan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kredit UMKM.

Adjusted R²

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi R^2 maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Adjusted R² (Adj. R²) dianggap mampu menjelaskan segala perubahan dalam varian yang terjadi apabila ada tambahan variabel.

Tabel 4.7
Hasil Uji R²

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Adj. R ²
Tingkat Pendapatan		
Tingkat Pendidikan		
Suku Bunga	Total Kredit UMKM	0.94
Penetrasi Demografis		
Penetrasi Geografis		

Sumber: Data sekunder diolah dalam Eviews 9

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Adj. R² dalam model penelitian ini adalah 0.94. Itu berarti bahwa 94 persen variabel terikat dalam penelitian dapat dijelaskan variabel bebas. Dengan kata lain, variabel bebas pada model penelitian ini mempengaruhi secara signifikan variabel terikat, dan di luar nilai itu dijelaskan di luar model oleh faktor-faktor lain.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Berikut hasil uji t dalam penelitian ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Variabel Independen	Koefisien	t Value	P Value
Konstan	-0.636859	-0.840230	0.4023
Tingkat Pendapatan	0.068975	1.460542	0.1465
Tingkat Pendidikan	-0.004370	-1.990323	0.0486
Suku Bunga	-0.003268	-1.601653	0.1116
Penetrasi Demografis	0.001063	0.126393	0.8996
Penetrasi Geografis	0.000282	2.699614	0.0078

Sumber: Data sekunder diolah dalam Eviews 9

Tabel di atas mengilustrasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

$$\text{KUMKM} = -0.64 + 0.07\text{Tingkat Pendapatan} - 0.0044\text{Tingkat Pendidikan} - 0.0033\text{Suku Bunga} + 0.0011\text{Penetrasi Demografis} + 0.0003\text{Penetrasi Geografis}$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Total Kredit UMKM

Hasil pengujian pengaruh PDRB atau tingkat pendapatan terhadap kredit UMKM menunjukkan koefisien yang positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit UMKM. Koefisien tingkat pendapatan yang positif menunjukkan apabila tingkat pendapatan mengalami peningkatan maka kredit UMKM akan mengalami peningkatan. Nilai probability yang tidak signifikan menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan secara individual tidak berpengaruh terhadap kredit UMKM. Maka dari hipotesis pertama “tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kredit UMKM” ditolak. Pengaruh positif ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fungacova dan Weill (2015), bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi kemungkinan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan. Selain itu Gine dan Yang (2009) juga menjelaskan ada hubungan yang positif antara tingkat pendapatan dan pinjaman atau kredit. Namun pengaruh positif ini tidak signifikan, maka tingkat pendapatan tidak berpengaruh langsung terhadap kredit UMKM dalam penelitian ini. Hasil yang tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa kredit UMKM seharusnya dapat didapatkan seluruh kalangan tanpa harus melihat tingkat pendapatannya, karena saat ini banyak kredit UMKM yang tidak memerlukan jaminan dan sebagainya sebagai syarat utamanya.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Total Kredit UMKM

Hasil pengujian pengaruh tingkat pendidikan terhadap kredit UMKM menunjukkan koefisien yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kredit UMKM. Koefisien tingkat pendidikan yang negatif menunjukkan apabila tingkat pendidikan mengalami peningkatan maka kredit UMKM akan mengalami penurunan. Nilai probability yang signifikan menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan secara individual berpengaruh terhadap kredit UMKM. Maka dari hipotesis kedua “tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kredit UMKM” ditolak. Pengaruh negatif yang signifikan ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, di mana saat ini meski pemahaman literasi keuangan masyarakat Indonesia kurang, tetapi penggunaan layanan keuangan terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang tidak perlu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi untuk dapat mengakses layanan keuangan, seperti halnya anak kecil yang didaftarkan kedua orang tuanya untuk mendapatkan akses layanan keuangan meski belum bertingkat pendidikan tinggi. Selain itu kredit UMKM banyak disalurkan ke kalangan yang tidak bertingkat pendidikan tinggi, meski penting namun tingkat pendidikan tidak menjamin kestabilan tingkat pendapatan masyarakat sehingga tidak menjadi salah satu pertimbangan untuk memutuskan seseorang mendapat kredit atau tidak. Di lain sisi, penyaluran kredit lebih sedikit dibandingkan permintaannya hal itu tentu membatasi masyarakat yang bertingkat pendidikan tinggi untuk mendapatkan kredit.

Pengaruh Suku Bunga terhadap Total Kredit UMKM

Hasil pengujian pengaruh suku bunga terhadap kredit UMKM menunjukkan koefisien yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit UMKM. Koefisien suku bunga yang negatif

menunjukkan apabila suku bunga mengalami peningkatan maka kredit UMKM akan mengalami penurunan, sebaliknya jika suku bunga mengalami penurunan maka kredit UMKM akan semakin tinggi. Nilai probability yang tidak signifikan menunjukkan bahwa variabel suku bunga secara individual tidak berpengaruh terhadap kredit UMKM. Maka dari hipotesis ketiga “suku bunga berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM” ditolak. Pengaruh negatif yang ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juda Agung, Bambang Kusmiarso, Bambang Pramono, Erwin G. Hutapea, Andry Prasmuko, Nugroho Joko Prastowo (2001), Kadek Sri Suarni, I Ketut Kirya, Fridayana Yudiaatmaja (2014), bahwa semakin rendah suku bunga maka akan semakin tinggi penggunaan kredit, walaupun dalam penelitian ini pengaruh suku bunga terhadap kredit UMKM tidak signifikan. Hasil yang tidak signifikan berarti penurunan suku bunga belum cukup tinggi untuk mendorong masyarakat mengakses kredit, yaitu saat ini suku bunga kredit UMKM masih berada di level atau di atas 10 persen yang terbilang masih cukup tinggi bagi masyarakat.

Pengaruh Penetrasi Demografis Perbankan terhadap Total Kredit UMKM

Hasil pengujian pengaruh penetrasi demografis perbankan terhadap kredit UMKM menunjukkan koefisien yang positif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kredit UMKM. Koefisien penetrasi demografis perbankan yang positif menunjukkan apabila penetrasi demografis perbankan mengalami peningkatan maka kredit UMKM akan mengalami peningkatan. Nilai probability yang tidak signifikan menunjukkan bahwa variabel penetrasi demografis perbankan secara individual tidak berpengaruh terhadap kredit UMKM. Maka dari hipotesis keempat “penetrasi demografis perbankan berpengaruh positif terhadap kredit UMKM” ditolak. Pengaruh positif ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rui Li, Qinghai Li, Shaoan Huang, Xi Zhu (2013). Sementara itu keadaan UMKM dan masyarakat sebagai penggerak di Jawa Tengah terbilang masih kurang kompetitif, sehingga lembaga keuangan enggan untuk menyalurkan dananya ke masyarakat. Saat ini kredit yang disalurkan lebih banyak dalam kategori kredit konsumtif bukan kredit modal kerja. Dari perbandingan data keadaan kredit UMKM Jawa Tengah dan penetrasi demografisnya juga terlihat hubungan yang tidak sejalan. Meski penetrasi demografis mengalami tren penurunan, kredit UMKM mengalami tren peningkatan yang cukup baik hingga 2015 walau sempat mengalami penurunan.

Pengaruh Penetrasi Geografis Perbankan terhadap Total Kredit UMKM

Hasil pengujian pengaruh penetrasi geografis perbankan terhadap kredit UMKM menunjukkan koefisien yang positif dan signifikan berpengaruh terhadap kredit UMKM. Koefisien penetrasi geografis perbankan yang positif menunjukkan apabila penetrasi geografis perbankan mengalami peningkatan maka kredit UMKM akan mengalami peningkatan. Sedangkan nilai probability yang signifikan menunjukkan bahwa variabel penetrasi geografis perbankan secara individual berpengaruh terhadap kredit UMKM. Maka dari hipotesis kelima “penetrasi geografis perbankan berpengaruh positif terhadap kredit UMKM” diterima. Pengaruh positif ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satya R. Chakravarty, Rupayan Pal (2013), Franklin Allen, Asli Demircuc-Kunt, Leora Klapper, Maria Soledad Martinez Peria (2016), Dipasha Sharma (2016), Duy Vuong Quoc (2012), Edith Leadaut Togba (2012), Ma-Azu Abdul-Jalil (2015). Dengan semakin banyak jaringan kantor perbankan maka seharusnya diharapkan hambatan secara geografis dalam mengakses jasa keuangan akan semakin berkurang.

KESIMPULAN

Penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana perkembangan inklusi keuangan di Indonesia, terutama ketika saat ini inklusi keuangan telah menjadi prioritas nasional oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya. Penelitian ini mengambil layanan kredit sebagai salah satu tolak ukur perkembangan inklusi keuangan, ketika penggunaan masyarakat terhadap layanan kredit tinggi maka jasa keuangan atau perbankan semakin inklusif. Selain itu, beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi inklusi keuangan pada umumnya juga diteliti pengaruhnya dalam penelitian ini dengan menyesuaikan faktor-faktor tersebut terhadap keadaan di Indonesia.

Pembangunan ekonomi dapat dimulai dari sisi mikro, karena itu penggunaan kredit telah menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui sektor riil. Semakin tinggi kredit UMKM yang disalurkan maka kesempatan masyarakat untuk memperoleh modal kerja

akan semakin luas sehingga pembangunan ekonomi yang merata dapat diraih. Penelitian ini menggunakan analisis data panel, dengan *Fixed Effect Model* dan *Generalized Least Square (GLS)*. Analisis tersebut menjelaskan pengaruh faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, suku bunga, penetrasi demografis serta penetrasi geografis perbankan terhadap kredit yang dalam penelitian ini adalah total kredit UMKM. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka ditemukan hasil penelitian seperti tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kredit UMKM. Hasil yang tidak signifikan tersebut terbilang tidak biasa karena pada dasarnya ketika tingkat pendapatan meningkat seharusnya akses masyarakat terhadap kredit UMKM akan meningkat, dengan tingkat pendapatan tinggi tersebut masyarakat akan memiliki lebih banyak kebutuhan serta lebih mudah dalam memberikan jaminan sebelum mengambil kredit.

Indeks tingkat pendidikan di Jawa Tengah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Itu berarti indeks tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kredit UMKM, meskipun di berbagai penelitian disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin tinggi kemungkinan masyarakat untuk mengakses jasa keuangan atau perbankan. Dalam hal ini, OJK menemukan bahwa banyak mereka yang tidak bertingkat pendidikan tinggi namun dapat mengakses layanan keuangan karena bantuan saudara atau orang tua.

Suku bunga memiliki pengaruh negatif, yaitu semakin rendah suku bunga maka akan semakin tinggi akses masyarakat terhadap kredit, begitupun sebaliknya. Selain itu penurunan suku bunga akan meningkatkan jumlah kredit yang digunakan. Pengaruh yang tidak signifikan dapat diartikan bahwa penurunan suku bunga saat ini tak cukup mendorong masyarakat untuk mengakses kredit UMKM, di mana penurunan suku bunga tidak setinggi yang diharapkan masyarakat yaitu masih berada di atas 10 persen yang masih cukup tinggi bagi masyarakat.

Sementara itu adanya kantor jaringan atau lembaga perbankan di Jawa Tengah tidak mempengaruhi secara langsung akses masyarakat terhadap kredit UMKM. Penetrasi demografis perbankan yang diukur dari jumlah jaringan kantor atau lembaga perbankan per 100.000 penduduk memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Sedangkan penetrasi geografis perbankan yang diukur dari jumlah jaringan kantor atau lembaga perbankan per 100 km² memiliki pengaruh positif yang signifikan. Hal itu menunjukkan bahwa kantor jaringan atau lembaga perbankan di Jawa Tengah dapat mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan dan kedepannya penyebaran kantor perbankan harus lebih efektif serta efisien.

Penelitian ini tentu jauh dari sempurna dan memiliki keterbatasan, selain karena inklusi keuangan memiliki lingkup yang sangat luas sehingga diperlukan penelitian-penelitian lanjutan, penelitian ini hanya mengambil sampel di Jawa Tengah. Selain itu variabel-variabel penelitian ini harus dikembangkan lagi dengan menyesuaikan keadaan inklusi keuangan di Indonesia. Sementara itu adjusted R² dalam penelitian ini sebesar 0,94 yang berarti sebesar 0.06 masih dapat dijelaskan dari variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Adapun saran yang diberikan dari penelitian ini seperti memperluas objek penelitian terkait penyaluran kredit UMKM dan inklusi keuangan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Melakukan penelitian dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi inklusi keuangan seperti jenis kelamin, umur, agama, ukuran usaha, karakteristik masyarakat dan kebijakan pemerintah seperti dalam penelitian Fungacova dan Weill (2015). Memperluas wawasan dan pengetahuan terkait inklusi keuangan di Indonesia dalam hubungannya dengan teknologi dan regulasi pemerintah seperti yang diteliti Chakravarty dan Pal (2013). Melakukan penelitian lebih lanjut terkait hubungan negatif antara penyaluran kredit UMKM dengan indeks tingkat pendidikan karena tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan seperti temuan penelitian ini.

REFERENSI

- Abdul-Jalil, Ma-Azu. (2015). Determinants of access to credit and its impact on household food security in karaga district of the northern region of Ghana. Faculty of agriculture, College of Agriculture and Natural Resources.
- Agung, Juda., *et al.* (2001). Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis: Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.



- Allen, F., Kunt, A. D., Klapper, L., Peria M. S. M. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *J. Financial Intermediation*.
- Auma, D., Mensah, P. A. Determinants of credit access and demand among small-holder farmers in Tigray region, Ethiopia. Norwegian University of Life Science, School of Economics and Business.
- Badaruddin. (2015). Pengaruh tingkat suku bunga terhadap penyaluran kredit konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang sungguminasa. E-Journal STIE Nobel.
- Bank Indonesia. (2013). Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion.
- Bansal, S. (2014). Perspective of Technology in Achieving Financial Inclusion in Rural India. *Procedia Economics and Finance*, 11, 472 – 480.
- Bayero, M. A. (2014). Effects of Cashless Economy Policy on financial inclusion in Nigeria: An exploratory study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 49 – 56.
- Beck, Thorsten., Kunt, A. D., Peria M. S. M. (2007). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *Journal of Financial Economics*, 85, 234-266.
- Chakravarty, S. & Pal, R. (2013). Financial Inclusion in India: An Auxiomatic Approach. *Journal of Policy Modeling*, 35, 813-837.
- Chen, K. C. and Chivakul, M. (2008). What Drives Household Borrowing and Credit Constraints? Evidence from Bosnia and Herzegovina. IMF Working Paper.
- Danistyoy, Gerry. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Permintaan dan penawaran kredit UMKM di Indonesia. Institut Pertanian Bogor.
- Diniz, E., Birochi R., Pozzebon, M. (2012). Triggers and barriers to financial inclusion: The use of ICT-based branchless banking in an Amazon county. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11, 484-494.
- Fungacova, Z. & Weill, L. (2015). Understanding financial inclusion in China. *China Economic Review*, 34, 196-206.
- Gine, X. & Yang, D. (2009). Insurance, credit, and technology adoption: Field experimental evidence from Malawi. *Journal of Development Economics*, 89, 1-11.
- Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2013). Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- International Center for Applied Economics and Finance. (2013). Financial Inclusion in Indonesia. United State Agency for International Development.
- Kunt, A. D., Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion, The Global Data Findex. World Bank Development Research Grup.
- Li, R., Li, Q., Huang, S., Zhu, Xi. (2013). The credit rationing of Chinese rural households and its welfare loss: An investigation based on panel data. *China Economic Review*, 26, 17-27.



- Maya Declaration. (2013). Putting Financial Inclusion on the Global Map. *Alliance For Financial Inclusion*.
- Nasution, C. S. (2010). Financial Inclusion Policy : Developed vs Developing Countries. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nikaido, Y., Pais, J., Sarma, M. (2015). What hinders and what enhances small enterprises' access to formal credit in India?. *Review of Development Finance*, 5, 43-52.
- Quoc, D. V. (2012). Determinants of household access to formal credit in the rural areas of the Mekong Delta, Vietnam. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Sekaran, Uma. (2011). Research Methods for Business. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan, M. A. (2016). Analisis keterkaitan inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan personal masyarakat di wilayah kota dan kabupaten provinsi jawa timur. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Sharma, Dipasha. (2015). Nexus between financialinclusion and economic growth Evidence from the emerging Indian economy. *Journal of Financial Economic Policy*, 8, 13-36.
- Situmorang, J.W. dan Situmorang, Jannes. (2015). Suku bunga perbankan masih penghambat Pembiayaan UMKM Indonesia.
- Suarni, K. S., Kirya, I. K., Yudiaatmaja, F. (2014). Pengaruh tingkat suku bunga kredit, tingkat efisiensi Bank dan tingkat kecukupan modal terhadap jumlah kredit yang disalurkan pada pt bank perkreditan rakyat nur abadi tahun 2011-2013. E-Journal Universitas Tingkat pendidikan Ganesha, 2.
- Togba, E. L. (2012). Microfinance and households access to credit: Evidence from Côte d'Ivoire. *Structural Change and Economic Dynamics*, 23, 473-486.
- Tu, T. T. T., Viet, N. Q. and Loi, H.H. (2015). Determinant of Access to Rural Credit and Its Effect on Living Standard: Case Study about Poor Households in Northwest, Vietnam (Note 1). *International Journal of Financial Research*.
- Ummah, B. B. (2015). Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Tingkat pendapatan di Indonesia. Institut Pertanian Bogor.
- Widarjono, Agus. (2013). Ekonometrika, Pengantar dan Aplikasinya. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.